



LKjIP

**(Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah)**

Tahun 2023

**BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, sehingga dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat di selesaikan.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tahun 2023 sebagaimana yang telah direncanakan dalam rencana kerja (Renja) Badan Penghubung Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2023.

Guna evaluasi pelaksanaan kegiatan ditahun selanjutnya, tentunya dalam penyusunan dokumen ini jauh dari kata sempurna untuk itu kami mengharapkan kritik dan saran dalam menyempurnakan laporan kinerja ini.

Semoga dokumen ini dapat bermanfaat untuk evaluasi sasaran dan program kegiatan ditahun mendatang guna menentukan arah kebijakan dan program serta kegiatan untuk mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi NTB tahun 2019 – 2023, dan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD Provinsi NTB pada periode selanjutnya tahun 2024 - 2026.

Jakarta, Januari 2023
Kepala Badan Penghubung Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Barat



SOFYAN, SH
NIP. 197212302009011002

DAFTAR ISI

Uraian	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Iktisar Eksekutif	iii
Bab I Pendahuluan	4
A. Latar Belakang	4
B. Gambaran Umum	5
C. Struktur organisasi	6
D. Aspek strategis dan permasalahan yang dihadapi	8
Bab II Perencanaan Kinerja	9
A. Perencanaan	9
1. Visi dan Misi	9
2. Tujuan dan Sasaran	10
3. Indikator Kinerja Utama	11
B. Perjanjian Kinerja	12
Bab III Akuntabilitas Kinerja	13
A. Capaian Kinerja	13
B. Realisasi Anggaran	19
Bab IV Penutup	24

EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)

Badan penghubung memiliki peran yang strategis dalam mendukung pembangunan daerah dimana dalam pelaksanaannya hubungan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, Lembaga Pemerintah non Departemen dan Swasta di Jakarta. Selain itu juga merupakan perpanjangan tangan dalam mempromosikan dan penyebaran informasi budaya daerah di jakarta.

Adapun capaian dan realisasi strategis badan penghubung Daerah Pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1. Sasaran Strategis, Indikator Target dan Realisasi.

Tujuan	Sasaran SKPD	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya kualitas pelayanan Badan Penghubung Provinsi NTB	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Daerah	95 %	95 %	100 %
	Meningkatnya kualitas pelayanan wisma NTB	95 %	95 %	100 %
	Meningkatnya kualitas pelayanan anjungan NTB di TMII	95 %	95 %	100 %

Dalam pengelolaan PAD Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB tahun 2023 memiliki target Pendapatan asli daerah yang bersumber dari penerimaan retribusi penyewaan kamar mess yang PAD sebesar Rp. 1.421.145.000,-. dimana mengalami perubahan setelah dilakukan evaluasi penerimaan 3 th terakhir menjadi sebesar Rp. 140.000.000,-. dengan realisasi pencapaian sebesar Rp. 154.260.000,- atau 110 % dari target perubahan yang telah ditentukan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Penghubung daerah memiliki peran yang strategis dalam pembangunan, dimana badan penghubung memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan pembangunan dengan Pemerintah Pusat dan membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan antar lembaga.

Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat bertanggung jawab kepada Gubernur selaku Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dan secara administratif dikoordinasikan oleh Asisten Tata Praja dan Aparatur. Merupakan organisasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang, berupa koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan dengan pemerintah pusat yang berkedudukan di Jakarta. Hal tersebut telah tertuang dalam 11. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut Badan Penghubung Daerah menyadari betul akan pentingnya penyusunan laporan kinerja, sebagai wujud pertanggungjawaban dengan apa yang telah dilakukan dalam pembangunan daerah selama satu tahun.

B. Gambaran Umum

a. Tugas Pokok

Merujuk kepada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Penghubung Daerah melaksanakan fungsi penunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat.

b. Fungsi

Dalam pelaksanaan tugas pokok sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Badan Penghubung Daerah mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan/materi dan Penyusunan kebijakan strategis Penghubung Daerah;
2. Penyusunan bahan kebijakan dan Pelaksanaan tugas dukungan teknis Penghubung Daerah;
3. Penyusunan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis Penghubung Daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi Penghubung Daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

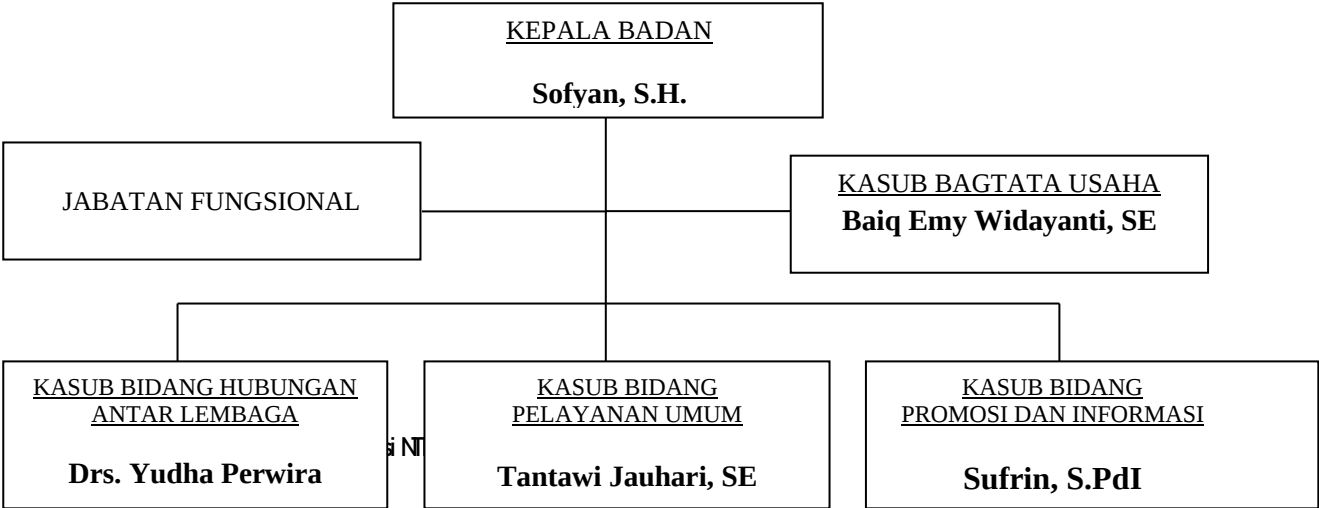
Adapun tugas masing-masing Sub Bagian dan Sub Bidang yang berada di Badan Penghubung Daerah, dapat diuraikan sebagai berikut;

- 1. Sub Bagian Tata Usaha, menyiapkan bahan/ materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Tata Usaha.
- 2. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas Menyiapkan bahan/ materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Hubungan Antar Lembaga.
- 3. Sub Bidang Promosi Dan Informasi mempunyai tugas Menyiapkan bahan/ materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Promosi dan Informasi.
- 4. Sub Bidang Pelayanan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan/ materi kebijakan, rencana/program dan menyelenggarakan penyusunan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, pengawasan, pelaporan, penyelenggaraan pemerintahan dibidang Pelayanan.

C. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan Program dan kegiatan yang telah direncanakan melalui Renstra 2019-2023, Badan Penghubung Daerah didukung oleh perangkat organisasi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dalam hal ini Badan Penghubung Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang dibantu Sub Bagian Tata Usaha, Sub Bidang Hubungan Antar lembaga, Sub Bidang Pelayanan Umum dan Sub Bidang Promosi dan Informasi, adapun Bagan Struktur Organisasi sebagai berikut :

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Badan Penghubung Daerah Provisi NTB Tahun 2023



1. Sumber Daya Manusia

Sumberdaya Manusia masih menjadi satu faktor yang menentukan keberhasilan pelaksanaan program kegiatan dalam mewujudkan visi dan misi NTB GEMILANG yang telah tertuang dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi NTB tahun 2019 – 2023. Sumber Daya Aparatur di Lingkungan Badan Penghubung Daerah terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai tidak Tetap (PTT).

Jumlah pegawai dilingkungan Badan Penghubung Daerah berdasarkan data jumlah pegawai pada akhir Tahun 2021 adalah sebanyak 50 orang, yang terdiri dari 44 ASN dan 6 PTT yang menurut status dan jenjang pendidikannya dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 1.1. Berdasarkan Golongan ASN

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	Golongan IV	0
2	Golongan III	29
3	Golongan II	14

Tabel 1.2. ASN Badan Penghubung Daerah Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Magister	3
2	Sarjana	22
3	D1 – D4	1
4	SLTA/SMK	17

Jumlah dan kualifikasi pegawai yang ada dirasa belum cukup berkompeten untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penghubung Daerah. Untuk itu perlu adanya dukungan dan perhatian dalam meningkatkan sumber daya manusia yang ada sehingga apa yang telah tertuang dalam rencana kerja dapat tercapai.

2. Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Penghubung Daerah didukung dengan moda transportasi berupa berupa kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 18 unit dan roda 2 (dua) sebanyak 11 unit. Terdapat 1 ruang rapat/pertemuan dan 36 kamar yang terdiri dari kamar hunian sebagai penghasil PAD sebanyak 30 Kamar, 2 kamar sebagai sarana administrasi perkantoran dan 4 (empat) Kamar sebagai Pelayanan kepada Pimpinan daerah yang melakukan tugas dinas di Jakarta.

Untuk menjalankan kegiatan pelayanan, penyebaran informasi dan promosi daerah sarana dan prasarana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Penghubung Daerah. Untuk fungsi promosi dan informasi badan penghubung mengelola anjungan di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang dapat dimanfaatkan sebagai media promosi budaya pariwisata NTB.

D. Aspek strategis dan permasalahan yang dihadapi

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTB tahun 2019-2023, visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 5 (lima) tahun kedepan adalah "Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang". Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Badan Penghubung Daerah sebagai salah satu perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang dengan memberikan pelayanan kepada pejabat, pegawai pemerintah provinsi, pimpinan dan anggota DPRD yang melaksanakan tugas dinas ke Jakarta, serta memfasilitasi hubungan kerja dan tugas-tugas koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota maka Badan Penghubung Daerah berkontribusi dalam pencapaian misi kedua yaitu "NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi".

Dalam mendukung pencapaian misi tersebut, Badan Penghubung Daerah juga melaksanakan tugas fasilitasi pameran produk industri kecil menengah, promosi dan penyampaian informasi potensi NTB, serta pentas seni budaya di Anjungan NTB pada Taman Mini Indonesia Indah. Anjungan NTB pada TMII tersebut dimanfaatkan juga sebagai sarana penyampaian informasi dan mengenalkan daerah NTB, mengingat TMII dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai penjuru daerah termasuk wisatawan mancanegara. Dengan memaksimalkan fungsi promosi diharapkan kedepannya akan ada kerjasama dari semua perangkat daerah dan kabupaten/kota dalam memberikan data terkait pariwisata serta data yang dibutuhkan dalam berinvestasi di NTB.

Dalam pencapaian visi misi dalam RPJMD Provinsi NTB tahun 2023 – 2023 serta pencapaian target RENSTRA, dirumuskan beberapa isu strategis yaitu:

1. Optimalisasi peran dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB sebagai duta daerah di Jakarta untuk mendapatkan dukungan dan informasi terkait lembaga-lembaga, swasta ataupun perorangan dalam pembangunan daerah.
2. Optimalisasi peran anjungan NTB TMII dalam promosi dan informasi potensi investasi pariwisata unggulan daerah NTB pada masyarakat lokal dan internasional di Jakarta.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB tahun 2019 – 2023 nomor 2 tahun 2020, mengusung visi “Membangun Nusa Tenggara Barat Yang GEMILANG” dimana gemilang dimaknakan sebagai keyakinan NTB untuk berperan besar di kancah Nasional dan International dengan percepatan dan lompatan pembangunan serta iktir mewujudkan NTB yang mampu bersaing, tangguh, dan tangguh. Dalam mewujudkan visi NTB GEMILANG ditetapkan enam misi pembangunan NTB yaitu :

- Misi I : NTB TANGGUH DAN MANTAP Melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah.
- Misi 2 : NTB BERSIH DAN MELAYANI Melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi.
- Misi 3 : NTB SEHAT DAN CERDAS Melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah.
- Misi 4 : NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan.
- Misi 5 : NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi.
- Misi 6 : NTB AMAN DAN BERKAH melalui perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan

1. VISI DAN MISI

Visi merupakan suatu tujuan yang ingin dicapai oleh suatu pemerintahan maupun organisasi sehingga visi itu penting untuk dituangkan dalam setiap perencanaan. Misi merupakan penjabaran dari visi atau suatu yang harus dilaksanakan oleh organisasi atau instansi pemerintah dalam rangka mencapai visi yang telah ditentukan. Dengan demikian diharapkan seluruh pegawai mengetahui arah kebijakan instansi dan mengetahui alasan keberadaan serta peranannya dalam mewujudkan visi tersebut.

Perencanaan kegiatan Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam upaya mewujudkan target pembangunan yang telah dituang dam RPJMD maupun Renstra OPD adalah:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya aparatur, yang ditujukan untuk mewujudkan peningkatan layanan administrasi serta pengembangan aparatur yang ahli dibidangnya, melalui peningkatan emosional dan spiritualnya, kemampuan intelektual dan keterampilan, serta etika moral aparatur secara optimal.
2. Meningkatkan dan mengembangkan daya saing wisma NTB sebagai asset daerah di Jakarta dan peningkatan layanan kepada tamu yang menggunakan pelayan Wisma NTB, melalui peningkatan kualitas layanan kamar Mess, kualitas SDM beserta sarana dan prasarana pendukung.
3. Meningkatkan layanan promosi dan penyebaran informasi potensi daerah. Ditujukan kepada upaya-upaya peningkatan dalam rangka memberikan pelayanan informasi daerah kepada masyarakat luas di Jakarta, dan mempromosikan potensi dan peluang

- investasi daerah, dengan sasaran peningkatan arus kunjungan wisatawan dan investasi ke daerah.
4. Meningkatkan layanan fasilitasi dan koordinasi antar lembaga kepada pejabat daerah dan pejabat pusat.
- Ditujukan dalam rangka memberikan pelayanan dan fasilitasi hubungan antar lembaga dengan baik, khususnya antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pemerintah Pusat di Jakarta dan sebaliknya, serta lembaga-lembaga negara, serta semua pihak yang berkompeten, melalui koordinasi dan sinkronisasi serta silaturahmi antar pihak-pihak yang terkait dengan pelayanan pejabat.

2. TUJUAN DAN SASARAN

Komponen dalam Perencanaan adalah menentukan tujuan pembangunan yang ingin dicapai diakhir waktu pembangunan baik Perencanaan pembangunan lima tahunan maupun pembangunan tahunan.

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Badan Penghubung Daerah
Tahun 2021-2023

Tujuan	Sasaran SKPD	Indikator Tujuan/Sasaran
Meningkatnya kualitas pelayanan Badan Penghubung Provinsi NTB		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Daerah
	Meningkatnya kualitas pelayanan wisma NTB	Tingkat kepuasan pelayanan tamu wisma NTB
	Meningkatnya kualitas pelayanan anjungan NTB di TMII	Tingkat kepuasan pelayanan pengunjung anjungan NTB di TMII
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat *	Meningkatkan Minat Masyarakat Nusantara atas Potensi pariwisata, seni dan kebudayaan daerah NTB *	Jumlah kunjungan wisatawan pada anjungan daerah NTB di Jakarta*
		Jumlah Penyelenggaraan event seni dan budaya pada anjungan NTB di TMII*
		Jumlah layanan fasilitasi dan koordinasi tugas kedinasan Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah Provinsi NTB di Jakarta dan sekitarnya*

Keterangan : * Tujuan sasaran dan indikator awal sebelum reviu Kemenpan RB.

Kebijakan yang ditetapkan Badan Penghubung Daerah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut adalah “Profesional dalam pelayanan prima dalam koordinasi serta promosi informasi kesenian daerah”.

3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam mencapai tujuan sasaran tersebut, ditetapkan indikator kinerja utama dalam mengukur, menghitung sumber data atas pencapaian yang diperoleh Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB .

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (FORMULASI PENGUKURAN, TIPE PENGHITUNGAN, SUMBER DATA)
1	2	3	4
1	Meningkatnya kualitas pelayanan wisma NTB	Tingkat Kepuasan Pelayanan Tamu Wisma NTB	$\frac{\text{Jumlah nilai kuesioner terhadap pelayanan tamu di Wisma NTB}}{\text{Jumlah responden x nilai maksimum kuesioner}} \times 100$
			- Sumber Data : Laporan Hasil survei kepuasan tamu di Wisma NTB
2	Meningkatnya kualitas pelayanan anjungan NTB di TMII	Tingkat Kepuasan pelayanan pengunjung Anjungan NTB di TMII	$\frac{\text{Jumlah nilai kuesioner terhadap pelayanan Pengunjung pada Anjungan NTB di TMII}}{\text{Jumlah responden x nilai maksimum kuesioner}} \times 100$
			- Sumber Data : Laporan Hasil survei kepuasan pengunjung pada Anjungan NTB di TMII

B. PERJANJIAN KINERJA

Sebagai bahan evaluasi kinerja pembangunan di awal Perencanaan telah ditentukan komitmen pimpinan yang merepresentasikan tekad dan janji guna mencapai kinerja yang jelas dan terukur, dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola, yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Tujuan penetapan kinerja adalah mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil. Adapun target kinerja yang ingin dicapai Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 sebagaimana table berikut :

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja (PK)
Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan wisma NTB	Tingkat kepuasan pelayanan tamu wisma NTB	95 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Meningkatnya kualitas pelayanan anjungan NTB di TMII	Tingkat kepuasan pelayanan pengunjung anjungan NTB di TMII	95 %

Sumber : Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB Tahun 2022

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan salah satu komponen dari prinsip “*Good Governance*” yang merupakan persyaratan bagi setiap unit kerja pemerintahan dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Laporan akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan ketaatan atas peraturan pemerintahan tentang pelaporan untuk memberikan transparansi dalam penggunaan keuangan negara yang baik dan bersih. Profesionalitas aparatur pengelolaan keuangan akan menjadi semangat kerja yang dinamis untuk menumbuhkan karya dan karsa dalam sektor riil kehidupan masyarakat. Hal itulah yang menjadi keseimbangan antara perencanaan dan pencapaian, perumusan dan pencapaian. Sinkronisasi antara laporan akuntabilitas kinerja dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah.

Dengan adanya laporan kinerja setiap tahunnya dapat menggambarkan trend yang dihadapi oleh setiap OPD dalam mencapai tujuan dan sasaran rencana strategis serta permasalahan yang dihadapi. ketersediaan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten, yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan kinerja instansi pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dalam rangka perbaikan biaya dan manfaat, efisiensi dan efektivitas.

A. Capaian Kinerja Organisasi

1.1. Capaian kinerja Tahun 2023

Sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah, tujuan dan sasaran Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB mengalami perubahan sebagaimana hasil evaluasi dengan kementerian dalam negeri, Adapun perubahan dimaksud sebagai berikut :

Tabel 3.1. Tujuan dan sasaran Badan Penghubung Tahun 2019-2023

Tujuan	Sasaran SKPD	Indikator Tujuan/Sasaran
Tujuan dan sasaran strategis		
Meningkatnya kualitas pelayanan Badan Penghubung Provinsi NTB		Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Daerah
	Meningkatnya kualitas pelayanan wisma NTB	Tingkat kepuasan pelayanan tamu wisma NTB

	Meningkatnya kualitas pelayanan anjungan NTB di TMII	Tingkat kepuasan pelayanan pengunjung anjungan NTB di TMII
Tujuan dan sasaran program prioritas		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan kepada masyarakat *	Meningkatkan Minat Masyarakat Nusantara atas Potensi pariwisata, seni dan kebudayaan daerah NTB *	Jumlah kunjungan wisatawan pada anjungan daerah NTB di Jakarta*
		Jumlah Penyelenggaraan event seni dan budaya pada anjungan NTB di TMII*
		Jumlah layanan fasilitasi dan koordinasi tugas kedinasan Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah Provinsi NTB di Jakarta dan sekitarnya*

Keterangan : *Tujuan sasaran dan indikator awal sebelum reviu Kemenpan RB.

Dengan adanya reviu tujuan dan sasaran Renstra badan Penghubung Daerah provinsi NTB maka realisasi capaian dapat dilihat pada tebel berikut:

Tabel : 3.2. Realisasi Sasaran Badan Penghubung Tahun 2023

Sasaran SKPD	Target	Realisasi	Capaian %
Meningkatnya kualitas pelayanan wisma NTB	95 %	95 %	100 %
Meningkatnya kualitas pelayanan anjungan NTB di TMII	95 %	95 %	100 %

1.2. Capaian Kinerja tahun 2020 hingga tahun 2023

Analisis pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada Badan Penghubung daerah tahun 2022 dilakukan terhadap target indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Penghubung daerah Tahun 2019-2023 yang diturunkan pada Rencana Kerja Tahun 2023 dan Penetapan Kinerja Tahun 2023. Adapun capaian kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 sebagai mana tabel berikut:

Tabel : 3.3. Pencapaian Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2023

No	INDIKATOR BIDANG URUSAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
(1)	(2)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Tingkat kepuasan pelayanan tamu wisma NTB			75%	75%	85%	85%	95%	95%
2	Tingkat kepuasan pelayanan pengunjung anjungan NTB di TMII			75%	75%	85%	85%	95%	95%
3	Jumlah kunjungan wisatawan pada anjungan daerah NTB di Jakarta	37.000	16.651	39.000	4.827	41.000	17.102	43.000	48.497
4	Jumlah Penyelenggaraan event seni dan budaya pada anjungan NTB di TMII	3 event	4 event	3 event	4 event	8 event	16 event	8 event	23 event
5	Jumlah layanan fasilitasi dan koordinasi tugas kedinasan Gubernur, Wakil Gubernur, Ketua DPRD dan Sekretaris Daerah Provinsi NTB di Jakarta dan sekitarnya	175 layanan	200 layanan	175 layanan	139 layanan	175 layanan	216 layanan	175 layanan	221 layanan
	LKIP Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB 2023								

Sumber : Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB Tahun 2023

Capaian angka kunjungan pada Anjungan NTB di TMII mengalami inflasi atau penurunan yang sangat signifikan yang dipengaruhi oleh force majeure yaitu Pandemi Covid-19 dimana diberlakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) serta Revitalisasi Taman Mini Indonesia Indah pada tahun 2020 hingga menjelang akhir tahun tahun 2022. Keadaan ini menghalangi tamu untuk melakukan kunjungan wisata ke TMII belum lagi ditambah pergantian pengelola dimana sebelumnya Yayasan Harapan Kita diambil oleh Pemerintah melalui Kemensetneg RI lalu dipindahkan ke BUMN PT. Taman Wisata Candi yang bekerja sama dengan PT. Bhumi Visatanda yang memberlakukan beberapa kebijakan yang dinilai mempengaruhi angka kunjungan diantaranya pembatasan kendaraan emisi di TMII serta akses Tamu anjungan yang dikenakan pembayaran saat masuk ke TMII.

Disamping itu Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB tahun 2023 memiliki target Pelayanan Badan Penghubung Daerah sesuai tugas dan fungsi sebagai penunjang koordinasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat baik fasilitasi pimpinan, protocol maupun administrasi kelembagaan dengan target 175 layanan dan realisasi mencapai 221 atau 126 % dari target perubahan yang telah ditentukan. Dimana capaian layanan tersebut terdiri atas 151 kegiatan pimpinan yang sudah terfasilitasi atas koordinasi dengan kementerian dan lembaga serta 71 Dokumen Daerah Nusa Tenggara Barat telah di ambil dari kementerian/lembaga dan dikirimkan ke daerah.

Adapun realisasi PAD pada tahun 2023 adalah :

Tabel 3.3. Data Realisasi PAD Wisma NTB

No.	Tahun	Retribusi Sewa Kamar Wisma NTB	
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	2016	1.500.000.000,-	1.097.639.197,-
2.	2017	1.500.000.000,-	912.800.000,-
3.	2018	1.500.000.000,-	723.155.000,-
4.	2019	1.500.000.000,-	1.347.300.000,-
5.	2020	1.522.000.000,-	241.630.000,-
6.	2021	1.542.800.000,-	90.260.000,-
7.	2022	1.421.145.000,-	136.500.000,-
8.	2023	140.000.000,-	154.260.000,-

Sumber : Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB Tahun 2023

Penerimaan PAD ada Pengelolaan Wisma NTB di Jakarta mengalami penurunan yang sangat signifikan yang dipengaruhi oleh force majeure yaitu Pandemi Covid-19 dimana diberlakukan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) di Indonesia serta regulasi Peraturan Gubernur NTB no 24 th 2017 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 1 tahun 2015 Tentang Perjalanan Dinas menyebutkan diwajibkan untuk

menggunakan fasilitas penginapan pada kantor Penghubung NTB di Jakarta bagi Perjalanan dinas Luar Daerah ke Jakarta akan tetapi didalam Pergub NTB No 4 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur NTB Nomor 81 tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas menyebutkan Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah bagi ASN dan Non ASN dapat menggunakan fasilitas penginapan pada Badan Penghubung NTB di Jakarta. Belum adanya peraturan daerah yang mewajibkan aparatur sipil negara untuk menggunakan fasilitas Badan Penghubung Daerah apabila melakukan perjalanan dinas ke Jakarta. Dimana di dalam Peraturan Gubernur NTB no 24 th 2017 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 1 tahun 2015 Tentang Perjalanan Dinas menyebutkan diwajibkan untuk mengunakan fasilitas penginapan pada kantor Penghubung NTB di Jakarta bagi Perjalanan dinas Luar Daerah ke Jakarta akan tetapi didalam Pergub NTB No 4 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur NTB Nomor 81 tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas menyebutkan Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah bagi ASN dan Non ASN dapat menggunakan fasilitas penginapan pada Badan Penghubung NTB di Jakarta.

1.3. Perbandingan Capaian Tahun 2023 dengan target 2023

Dalam rencana strategis Badan Penghubung Daerah telah tertuang Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama pembangunan 5 (lima) tahun. Adapun target tujuan sasaran pembangunan badan penghubung adalah sebagai berikut :

Tabel : 3.4. Target tujuan dan sasaran tahun 2021 – 2023

Tujuan	Sasaran SKPD	Indikator Tujuan/Sasaran	2021		2022		2023	
			Target	Kinerja	Target	Kinerja	Target	Kinerja
Meningkatnya kualitas pelayanan Badan Penghubung Provinsi NTB		Indikator tujuan : Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Badan Penghubung Daerah	75%	75%	85%	85%	100%	95%
	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan wisma NTB	Indikator Sasaran 1 : Tingkat kepuasan pelayanan tamu wisma NTB	75%	75%	85%	85%	100%	95%
	Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan anjungan NTB di TMII	Indikator Sasaran 2 : Tingkat kepuasan pelayanan pengunjung anjungan NTB di TMII	75%	75%	85%	85%	100%	95%

Sumber : Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB Tahun 2023

1.4. Perbandingan capaian tahun 2023 dengan capaian Nasional

Dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah tahun 2019 – 2023 Badan penghubung Daerah memiliki tugas dan fungsi sebagai OPD penunjang pelaksanaan pembangunan daerah dan pelayanan terhadap pimpinan kepala

daerah di Jakarta. Sehingga sasaran pembangunan nasional berbeda dengan tujuan dan sasaran Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB.

1.5. Analisis keberhasilan dan kegagalan capaian

Badan Penghubung Daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah memiliki satu seksi promosi dan informasi yang bertempat di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Untuk itu tugas yang dibebankan adalah jumlah kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun nusantara sebagai bentuk penyampaian promosi yang dilakukan, dengan kata lain semakin banyaknya pengunjung yang datang maka semakin banyak minat wisatawan untuk berkunjung ke provinsi Nusa Tenggara Barat. Sehingga asumsinya akan meningkatkan pendapatan daerah apabila wisatawan tersebut berkunjung ke daerah.

Selama masa transisi pemulihan ekonomi banyak ASN dan Kepala daerah yang berkunjung ke Jakarta namun kenyataannya belum menggunakan fasilitas Wisma NTB, hal ini tentunya mengakibatkan rendahnya pendapatan yang bersumber dari sewa kamar yang telah ditargetkan. Kedepan diharapkan kepada ASN yang ke Jakarta dapat menggunakan fasilitas MESS NTB sebagai bentuk dukungan pendapatan terhadap daerah, selain hal tersebut diharapkan juga adanya dukungan kebijakan yang dapat mengikat ASN apabila ke Jakarta mengharuskan untuk menggunakan fasilitas yang telah tersedia di Wisma NTB.

1.6. Analisis efisiensi penggunaan anggaran

Pelaksanaan efisiensi anggaran di Badan Penghubung Daerah dilakukan dengan melakukan analisa rencana belanja prioritas untuk mencapai target kinerja seperti AC dan mesin cuci serta belanja lain yang dianggap penting untuk operasional Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB. Jumlah persentase penggunaan anggaran pada Badan Penghubung Daerah sebesar 93.63% dimana hampir seluruh rencana anggaran atas kegiatan-kegiatan pada Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB telah terserap dengan baik.

1.7. Analisis Program Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja.

Analisis pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada Badan Penghubung daerah tahun 2023 dilakukan terhadap target indikator kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Penghubung daerah Tahun 2019-2023 yang diturunkan pada Rencana Kerja Tahun 2023 dan Penetapan Kinerja Tahun 2023. Adapun besarnya target kinerja pada rencana strategis sebesar 100% dievaluasi pada tingkat rencana kerja menjadi 95%, dimana belum dimungkinkan mencapai tingkat kepuasan pada rencana strategis dengan memperhatikan kondisi sarana dan prasarana Wisma NTB masih belum maksimal. Secara bertahap Badan Penghubung Daerah memprioritaskan belanja untuk peningkatan sarana dan prasarana dengan memperhatikan anggaran yang diberikan.

B. Realisasi Anggaran

Pada tataran sistem pengukuran kinerja, setiap anggaran atau keuangan yang dikeluarkan harus memiliki nilai kinerja, untuk itu program kegiatan yang dilaksanakan merupakan serangkaian kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

Tabel 3.39.
Realisasi Anggaran Tahun 2023

No.	Sasaran	Program	Indikator Sasaran/ Program	Kinerja (%)			Anggaran (Rp)		
				Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	%
A.	Meningkatnya kualitas pelayanan Badan Penghubung Provinsi NTB		Tingkat Kepuasan Pelayanan Penghubung	95%	97,20	100,38			
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP	A	BB	%	11.778.492.985	10.929.011.789	92,79%
		Kegiatan 1 : Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan	1 dokumen	1 dokumen	100%	43.389.500	43.359.000	99,93%
		Sub Keg. 1.1 : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan	1 dokumen	1 dokumen	100%	6.674.000	6.674.000	100%
		Sub Keg. 1.2 : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	3.389.500	3.389.500	100%
		Sub Keg. 1.3 : Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	6.114.000	6.114.000	100%
		Sub Keg. 1.4 : Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	9.410.500	9.380.500	99,68%
		Sub Keg. 1.5 : Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1 dokumen	100%	9.194.500	9.194.000	99,99%

		Sub Keg. 1.6 : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 dokum en	1 dokumen	100%	3.936.000	3.936.000	100%
		Sub Keg. 1.7 : Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 dokum en	1 dokumen	100%	4.671.000	4.671.000	100%
		Kegiatan 2 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang tersusun	1 Doku men	12 Dokume n	120%	6.042.696.873	5.505.216.691	91,11%
		Sub Keg. 2.1 : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	44 Orang/ Bulan	44 Orang/ Bulan	100%	6.042.696.873	5.505.216.691	91,11%
		Kegiatan 3 : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen kebutuhan barang daerah	1 dokum en	1 dokume n	100%	21.163.400	20.593.400	97,31%
		Sub Keg. 3.1 : Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 dokum en	1 dokumen	100%	21.163.400	20.593.400	97,31%
		Kegiatan 4 : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	4 Rekeni ng	4 Rekenin g	100%	1.196.999.300	1.196.062.269	99,92%
		Sub Keg. 4.1 : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Peneran gan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	100%	98.600.000	98.500.800	99,90%
		Sub Keg. 4.2 : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	255.483.500	254.974.875	99,80%
		Sub Keg. 4.3 : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	66.718.500	66.559.500	99,76%
		Sub Keg. 4.4 : Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	9.997.300	9.996.000	99,99%

		Sub Keg. 4.5 : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	100%	16.200.000	16.200.000	100%
		Sub Keg. 4.6 : Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	100%	200.000.000	199.970.000	99,99%
		Sub Keg. 4.7 : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan	60 Laporan	100%	550.000.000	549.861.094	99,97%
		Kegiatan 5 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Kendaraan dinas yang diadakan	1 Unit	1 Unit	100%	32.219.000	32.030.000	99,41%
		Sub Keg. 5.1 : Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	1 Unit	100%	32.219.000	32.030.000	99,41%
		Kegiatan 6 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana prasarana yang tersedia	25 Unit	25 Unit	100%	3.767.795.912	3.466.957.554	92,02%
		Sub Keg. 6.1 : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	100%	18.000.000	17.459.600	97,00%
		Sub Keg. 6.1 : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100%	731.158.800	518.962.689	70,98%
		Sub Keg. 6.2 : Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100%	67.580.000	67.580.000	100%
		Sub Keg. 6.3 : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100%	2.951.057.112	2.862.955.265	97,01%
		Kegiatan 7 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah kendaraan operasional yang terpelihara	15 Unit	15 Unit	100%	674.229.000	664.792.875	98,60%

		Sub Keg. 7.1 : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	28 Unit	28 Unit	100%	357.320.000	357.320.000	100%
		Sub Keg. 7.2 : Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi	2 Unit	2 Unit	100%	316.909.000	307.472.875	97,02%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Angka kunjungan wisatawan pada Anjungan NTB TMII (orang)	43000 orang	48497 orang	112%	1.850.266.700	1.832.216.300	99,02%
		Kegiatan 8 : Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah event Promosi yang dilaksanakan	8 Kali	23 Kali	288%	1.850.266.700	1.832.216.300	99,02%
		Sub Keg. 8.1 : Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	8 Kali	23 Kali	288%	520.000.000	519.950.000	99,99%
		Sub Keg. 8.1 : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	1 Lapora n	1 Laporan	100%	1.330.266.700	1.312.266.300	98,65%
	Total						13.628.759.685	12.761.228.089	93,63%

PENUTUP

Pendapatan asli daerah pada Wisma NTB tercapai pada tahun 2023, hal tersebut merupakan hasil dari evaluasi Penerimaan Wisma NTB selama 3 tahun terakhir tingkat hunian pada Mess NTB masih rendah dan diusulkan penyesuaian target penerimaan Wisma selama belum ada regulasi yang mewajibkan Aparatur Sipil Negara provinsi NTB untuk menginap di Wisma NTB pada saat melakukan perjalanan dinas di Jakarta.

Anjungan NTB pada TMII melampaui angka kunjungan yang ditetapkan pada renstra, hal ini melebihi ekspektasi karena baru dibuka. Namun masih terdapat kekurangan sarana kendaraan listrik yang dihimbau oleh pengelola dan Sekretariat Negara untuk dimiliki tiap-tiap anjungan.

Pelayanan Kelembagaan merupakan fungsi Badan Penghubung yang teridentifikasi sebagai penunjang capaian IKU Badan Penghubung Daerah. Semoga pada tahun berikutnya dapat dikembangkan lebih luas namun tetap memperhatikan ketersediaan anggaran.

Pada dimensi lain, Pembangunan Ibu Kota Nusantara terus berlanjut sehingga perlu diperhatikan Pembangunan Penghubung Nusa Tenggara Barat (Kantor Provinsi) di Ibu Kota Nusantara. Walaupun saat baru ada site plan namun belum ada arahan untuk blueprint, periode pembangunan untuk site tersebut maupun kriteria bangunan yang dapat didirikan di site tersebut. Sehingga isu strategis terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara diharapkan dapat dituang pada dokumen perencanaan terlebih dahulu.

Demikian LKJiP Tahunan ini disusun, semoga dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas serta dapat memenuhi tuntutan dan keinginan masyarakat dalam rangka mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di tahun berikutnya.

CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN APBD			Penanggung Jawab	
		Uraian	Satuan	Target	Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%		
1	Meningkatnya kualitas pelayanan wisata NTB	1 Tingkat kepuasan pejabat, OPD terhadap pelayanan Badan Penghubung Daerah NTB	%	95	95	100	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	11.778.492.985,00	10.929.011.788	92,79		
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.389.500	43.359.000	99,93		
							Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.674.000	6.674.000	100,00	Subbagian Tata Usaha	
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	3.389.500	3.389.500	100,00	Subbagian Tata Usaha	
							Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	6.114.000	6.114.000	100,00	Subbagian Tata Usaha	
							Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	9.410.500	9.380.500	99,68	Subbagian Tata Usaha	
							Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	9.194.500	9.194.000	99,99	Subbagian Tata Usaha	
							Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.936.000	3.936.000	100,00	Subbagian Tata Usaha	
							Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.671.000	4.671.000	100,00	Subbagian Tata Usaha	
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.042.696.873	5.505.216.691	91,11		
							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.042.696.873	5.505.216.691	91,11	Subbagian Tata Usaha	
							Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	21.163.400	20.593.400	97,31		
							Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	21.163.400	20.593.400	97,31	Subbagian Tata Usaha	
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.196.999.300	1.196.062.269	99,92		
							Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	98.600.000	98.500.800	99,90	Subbagian Tata Usaha	
							Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	255.483.500	254.974.875	99,80	Subbagian Tata Usaha	
							Penyediaan bahan logistik kantor	66.718.500	66.559.500	99,76	Subbagian Tata Usaha	
							Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9.997.300	9.996.000	99,99	Subbagian Tata Usaha	
							Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	16.200.000	16.200.000	100,00	Subbagian Tata Usaha	
							Fasilitasi Kunjungan Tamu	200.000.000	199.970.000	99,99	Subbagian Tata Usaha	
							Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	550.000.000	549.861.094	99,97	Subbagian Tata Usaha	
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	32.219.000	32.030.000	99,41		

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja					Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	ANGGARAN APBD			Penanggung Jawab
		Uraian	Satuan	Target	Realisasi	%		Pagu	Realisasi	%	
							Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	32.219.000	32.030.000	99,41	Subbagian Tata Usaha
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.767.795.912	3.466.957.553	92,02	
							Penyediaan jasa surat menyurat	18.000.000	17.459.600	97,00	Subbagian Tata Usaha
							Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	731.158.800	518.962.689	70,98	Subbagian Tata Usaha
							Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	67.580.000	67.580.000	100,00	Subbagian Tata Usaha
							Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	2.951.057.112	2.862.955.264	97,01	Subbidang Pelayanan Umum
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	674.229.000	664.792.875	98,60	
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	357.320.000	357.320.000	100,00	Subbagian Tata Usaha
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	316.909.000	307.472.875	97,02	Subbagian Tata Usaha
							Jumlah Sasaran 1	11.778.492.985	10.929.011.788	92,79	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan anjungan NTB di TMII	2 Tingkat Kepuasan pelayanan pengunjung wisma dan Anjungan NTB di TMII	%	95	95	100	Program Pelayanan Penghubung	1.850.266.700	1.832.216.300	99,02	Subbid Promosi dan informasi
							Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	1.850.266.700	1.832.216.300	99,02	
							Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	-	-	-	Subbidang Hubungan Antar Lembaga
							Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	520.000.000	519.950.000	99,99	Subbid Promosi dan informasi
							Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	1.330.266.700	1.312.266.300	98,65	Subbidang Pelayanan Umum
							Jumlah Sasaran 2	1.850.266.700	1.832.216.300	99,02	
							Jumlah Sasaran 1+2	13.628.759.685	12.761.228.088	93,63	

Jakarta, 10 Februari 2024
KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

SOLIMAN, SH
NIP. 197212102009011002